UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Permohonan Penangguhan Penahanan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Nida Ul Haq, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2010, *Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor*, Jakarta, 2010.

Budiardjo, Miriam, 1980, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Efendi, Tolib, 2015, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang Setara Press, Malang.

Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Chandra M, 2014, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.

Harahap, Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

HS, Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Permohonan Penangguhan Penahanan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Nida Ul Haq, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mulyadi, Lilik, 2012, *Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba, Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan*, Badan Litbang Diklat Kundil Mahkamah Agung RI, Jakarta.

_____, 2013, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta.

Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Rukmini, Mien, 2003, "*Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*, Penerbit Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Soemantri, Sri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Luthan, Salman, dkk, *Pra-peradilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, ICJR, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Permohonan Penangguhan Penahanan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Nida Ul Haq, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)Staatblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

C. Jurnal dan Internet

Adikusumo, M. Nurachman, 2005, Penggunaan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Peradilan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Implementasi Permohonan Penangguhan Penahanan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Nida Ul Haq, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pidana Indonesia, *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Afwanhofar, Ahmad, 2015, Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan Di Polresta Yogyakarta, *Penulisan Hukum*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bina Nusantara, "*Anomali Kriteria Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia*", diakses dari http://business-law.binus.ac.id/2016/06/17/anomali-kriteria-kejahatan-luar-biasa-di-indonesia/, pada tanggal 12 April 2019 pukul 11.00 WIB.

Enggarsasi, Umi dan Sumanto, Atet, "Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Di Lembaga Kepolisian Berdasarkan KUHAP Dan Peraturan Pelaksanaannya", Perspektif, Vol. X, No. 4, 2005.

Hukum Online, "Arti "Bukti Permulaan yang Cukup" dalam Hukum Acara Pidana", diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5940eb061eb61/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana, pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 16.00 WIB.

Indonesian Corruption Watch, "Penindakan Kasus Korupsi 2018", diakses dari https://www.antikorupsi.org/id/web/tren-penindakan-kasus-korupsi-2018?width=1000&height=700, pada tanggal 30 April 2019 pukul 12.17 WIB.

Meinastiti, Nugrahini, 1995, Penahanan Bagi Tersangka atau Terdakwa di Luar Rumah Tahanan Negara, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rumbay, M. Eduard, 2011, Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Suhariyanto, Budi "Kedudukan Hakim Dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 4, 2017